

**PROGRAM PBA SEBAGAI SARANA
UNTUK MENCAPAI *MDGs***

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional PTJJ
Di Pondok Cabe 10 Maret 2008

Oleh:
Deetje Sunarsih

**UNIVERSITAS TERBUKA
UPBJJ BOGOR
2009**

PROGRAM PBA SEBAGAI SARANA

UNTUK MENCAPAI MDGs

Deetje Sunarsih (deetje@mail.ut.ac.id)
Universitas Terbuka UPBJJ Bogor

Abstract

Distance education system make educational more accessible for students from remote area. FKIP has study program D2 PGSD, a diploma program for elementary teacher, which has a course named Pendidikan Masyarakat; and SIPGSD a bachelor degree program for elementary teacher too, which has a course named Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan. Both courses have the same task for the students that is to make some illiterate person become literate through PBA program. The discussion in this paper is focused on how PGSD students done their task besides they participate in achieving MDGs especially goal 2 and 7.

Key Words: PGSD students, PBA program, illiterate person, goal 2 & 7 of MDGs.

UPBJJ-UT (Unit Program Belajar Jarak Jauh-Universitas Terbuka) adalah unit pelaksana teknis UT di daerah. Saat ini terdapat 37 UPBJJ-UT di seluruh Indonesia. Di propinsi Jawa Barat (Jabar) terdapat dua UPBJJ-UT, yaitu UPBJJ-UT Bandung dan UPBJJ-UT Bogor. Wilayah kerja UPBJJ-UT Bogor meliputi: Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur. Kota dan Kabupaten di Jabar selain yang telah disebutkan, masuk ke dalam wilayah kerja UPBJJ-UT Bandung.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jabar, persentase angka melek huruf di Jabar adalah 94,87 persen. Jabar menempati posisi ketiga penderita buta aksara terbesar di Indonesia. Kantong-kantong buta aksara di Jabar adalah: Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Sumedang.

Sementara itu, data BPS tahun 2005 menyatakan bahwa Kabupaten Bogor menduduki peringkat kedua angka buta aksara terbanyak di Jabar yaitu 149.000

orang dengan rincian seperti Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Angka buta aksara di Kabupaten Bogor tahun 2005

USIA	Jenis Kelamin		JUMLAH
	Laki-laki	Wanita	
15 – 44	11.386 (25,1%)	34.056 (74,9%)	45.442
45 – keatas	24.054 (23,2%)	79.504 (76,8%)	103.556

Angka buta aksara di Kabupaten Bogor atau di Propinsi Jabar pada umumnya, seperti yang diuraikan di atas tidak sejalan dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM). MDGs adalah serangkaian tujuan yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium pada bulan September tahun 2000. MDGs mempunyai delapan tujuan yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2015. Sementara itu pada tahun 2005, kedelapan tujuan tersebut akan dievaluasi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Apa saja tujuan pembangunan milenium itu? Tujuan atau sasaran mana saja yang mungkin dicapai melalui bidang pendidikan, khususnya pendidikan jarak jauh? Bagaimana cara UT membantu Pemerintah mencapai tujuan atau sasaran tersebut pada tahun 2015 atau sebelumnya?

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

Ada delapan sasaran atau tujuan yang harus dicapai sebagai target pembangunan yang spesifik, bertenggat waktu dan terukur. Tujuan dan target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah sebagai berikut.

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan

- Mengurangi sampai setengah penduduk dunia yang berpenghasilan kurang dari US \$ 1 perhari
- Mengurangi sampai setengah penduduk dunia yang menderita

kelaparan

2. Tercapainya pendidikan dasar secara universal

- Memastikan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasarnya

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

- Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah (tahun 2005) dan untuk semua tingkatan (tahun 2015)

4. Menurunkan tingkat kematian anak

- Mengurangi sampai dua pertiga tingkat kematian balita

5. Meningkatkan kesehatan ibu

- Menurunkan sampai tiga perempat rasio kematian ibu pada proses melahirkan

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain

- Menghentikan dan mulai mencegah penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya

7. Menjamin keberlanjutan lingkungan

- Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara dan program; serta memperbaiki sumber daya lingkungan yang rusak atau hilang
- Menurunkan sampai 50% jumlah orang yang tidak memiliki akses (secara berkelanjutan) untuk memperoleh air bersih (aman untuk diminum)

8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

- Mengembangkan lebih jauh perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diprediksi dan tidak diskriminasi, termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan, dan penurunan tingkat kemiskinan, baik secara nasional maupun internasional
- Membantu kebutuhan khusus negara kurang berkembang, termasuk negara kepulauan dan terpencil.

- Secara komprehensif membuat persetujuan mengenai masalah hutang negara-negara berkembang
- Mengembangkan usaha produktif yang layak dijalankan untuk orang muda
- Bekerja sama dengan industri farmasi dalam penyediaan obat-obat penting yang terjangkau di negara-negara berkembang
- Bekerja sama dengan pihak swasta yang memberikan keuntungan di bidang teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Universitas Terbuka yang menerapkan Sistem Belajar Jarak Jauh dapat menjangkau mahasiswa sampai tingkat kecamatan dan dalam jumlah besar. Hal ini dapat menjadi modal bagi UT untuk berpartisipasi aktif membantu Pemerintah dalam mencapai sasaran MDGs. Program studi yang banyak mahasiswanya dan menjangkau hampir di seluruh kecamatan di Indonesia adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Jadi, bila ada suatu konsep bagus yang akan disebarluaskan ke masyarakat dalam waktu yang tidak mendesak, dapat dititipkan ke satu mata kuliah di program PGSD.

Dari kedelapan sasaran MDGs di atas ada beberapa sasaran yang dapat dicapai melalui mata kuliah di program PGSD seperti sasaran 2,3, dst. Namun bila dikaji lebih mendalam tentang SDM dan program studi yang dimiliki UT, nampaknya sasaran 2 (tercapainya pendidikan dasar secara universal) dan sasaran 7.1 (Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara dan program; serta memperbaiki sumber daya lingkungan yang rusak atau hilang) merupakan sasaran yang agak ‘mudah’ untuk mencapainya. Kebetulan di kurikulum PGSD terdapat mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan (S1 PGSD) dan Pendidikan Masyarakat (D2 PGSD).

Program PGSD FKIP-UT

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UT (FKIP-UT) adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bersifat *in-service training*, yang

diperuntukkan bagi guru dalam jabatan. Dengan demikian, semua mahasiswa FKIP adalah guru, bukan calon guru. Semula FKIP-UT diberi kepercayaan oleh Depdiknas untuk menyelenggarakan program penyetaraan untuk guru SD setingkat Diploma 2 bagi guru-guru SD lulusan SPG yang belum berijazah D2. Kemudian program tersebut menjadi program studi D2 PGSD, tetap, untuk guru-guru SD lulusan SPG atau SMA yang belum berijazah D2. Pada saat itu guru SD dipersyaratkan memiliki ijazah D2 PGSD. Sejak tahun 2002 FKIP-UT diberi ijin untuk membuka program studi S1 PGSD bagi guru-guru SD yang sudah berijazah D2 PGSD. Memang, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 mengamanatkan agar guru SD sebagai pendidik berijazah S1. Maka sejak masa registrasi 2006.1 program studi D2 PGSD tidak menerima mahasiswa baru lagi. Di lain pihak, program S1 PGSD mulai menerima mahasiswa baru lulusan SLTA yaitu pada semester 1. Sedangkan mahasiswa baru S1 PGSD yang masuk menggunakan ijazah D2 PGSD langsung menduduki semester 6.

Program PBA di D2 PGSD

Pada tahun 2006 Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Ditjen PLS) bekerja sama dengan UT dalam mempercepat upaya peningkatan pencapaian jumlah masyarakat yang melek aksara dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program Pendidikan Dasar (Pendas) UT untuk berperan aktif dalam Program PBA (Pemberantasan Buta Aksara). Program PBA tersebut diintegrasikan ke dalam Kurikulum Program Pendas melalui mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Masyarakat yang berbobot 2 sks.

Dalam struktur kurikulum D2 PGSD tidak terdapat nama mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Mata kuliah Pendidikan Masyarakat merupakan bagian dari sks mata kuliah Agama yang berkedudukan di semester 5. Maksudnya adalah, mahasiswa D2 PGSD yang tidak mendapatkan pembebasan mata kuliah Agama di semester lima (karena masa kerjanya kurang dari 5 tahun) dapat mengambil mata kuliah Pendidikan Masyarakat (2 sks) dan mengikuti mata kuliah Agama

yang 2 sks. UPBJJ-UT yang memungkinkan (mempunyai mahasiswa D2 PGSD semester 4 dan wilayahnya merupakan kantong buta aksara) akan dilibatkan dalam kerja sama UT dengan Ditjen PLS di atas. Pada penyelenggaraan program PBA, UPBJJ-UT dibimbing oleh Purek 3 dan dibawah koordinasi LPPM-UT dan BAAPM.

Mata kuliah Pendidikan Masyarakat merupakan mata kuliah praktek. Kelulusan mata kuliah ini tidak mempersyaratkan Ujian Akhir Semester (UAS), tapi mahasiswa akan lulus bila ia dapat meleleaksarkan 5-7 orang warga belajar (WB) yang dibuktikan dengan perolehan SUKMA bagi WBnya; dan pembuatan laporan praktek/pelaksanaan PBA. Pada mata kuliah ini disediakan tutorial, di mana tutor disebut sebagai instruktur. Sementara mahasiswa sebagai Tutor bagi WB (Warga Belajar)nya. Pada pelaksanaannya, ada bantuan biaya dari Pusat yang digunakan untuk rekrutmen WB, tes awal, ATK WB sampai ujian SUKMA.

Pada tahun 2006, Program PBA seperti di atas dilaksanakan di 13 UPBJJ-UT, yaitu di UPBJJ-UT Surabaya, Malang, Jember, Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Makassar, Serang, Mataram, Pontianak, dan Gorontalo. UPBJJ-UT Bogor pada tahun 2006 mendapat kuota 60 mahasiswa (300 WB) yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor dan di Kabupaten Sukabumi. Sementara tahun 2007 UPBJJ-UT Bogor sebenarnya mendapat kuota 120 mahasiswa (600 WB) tapi yang terjaring hanya 85 mahasiswa (425 WB). Masalah yang dihadapi dalam rekrutmen mahasiswa adalah banyaknya mahasiswa yang mendapat pembebasan mata kuliah Agama, dan kadang-kadang adanya hambatan yang datang dari pihak Pemda. Sedangkan masalah mahasiswa dalam menjaring atau merekrut WB adalah budaya malu yang salah penerapan oleh warga yang buta aksara, dan banyaknya institusi atau lembaga yang juga melaksanakan program PBA.

Program PBA di S1 PGSD

Integrasi program PBA ke dalam kurikulum S1 PGSD dilakukan melalui mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan yang berbobot 3 sks. Berbeda

dengan mata kuliah Pendidikan Masyarakat yang merupakan mata kuliah praktek, mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan adalah mata kuliah berpraktek. Artinya, mata kuliah tersebut menuntut mahasiswa melakukan praktek di samping mengikuti ujian akhir semester (UAS). Untuk praktek, mahasiswa dapat memilih satu di antara tiga macam praktek, yaitu: 1) Praktek Pembelajaran Keaksaraan Fungsional (PBA), 2) Praktek Taman Bacaan Masyarakat, dan 3) Praktek Pembinaan Program Kepemudaan.

Kelulusan dari mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan ditentukan oleh nilai UAS (50 %) dan nilai laporan praktek (50 %). Mata kuliah ini dirasakan agak berat oleh mahasiswa karena di samping harus melakukan pembimbingan kepada warga belajar, mahasiswa juga harus belajar untuk menghadapi UAS. Lebih dari itu, dalam penyelenggaraan mata kuliah ini tidak ada bantuan dana, baik dari Ditjen PLS maupun UT. Padahal dalam pelaksanaan mata kuliah ini sangat banyak diperlukan biaya. Yang ada biayanya adalah tutorial saja, sementara agar WB tetap mau belajar sampai mendapatkan SUKMA diperlukan penggunaan media/metode yang menarik bagi WB, misalnya praktek membuat kue/masakan.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa implementasi program PBA melalui mata kuliah Pendidikan Masyarakat lebih menguntungkan mahasiswa ditinjau dari segi perolehan nilai (tanpa harus mengikuti UAS), dan bantuan biaya pelaksanaan program. Namun bagi pihak Pemda dan UT, dalam pencapaian target jumlah WB yang memperoleh SUKMA, lebih menguntungkan bila mengimplementasikan program PBA melalui mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan; mengingat mata kuliah ini wajib ditempuh oleh semua mahasiswa S1 PGSD.

Tabel 2. Perbandingan MK Pendidikan Masyarakat dan
MK Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan

Aspek \ MK	Pendidikan Masyarakat	Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan
Program Studi Peserta SKS Jenis MK Macam Praktek Tutorial Nilai Akhir Biaya penyelenggaraan program	D2 PGSD Mhs yg tdk bebas MK Agama 2 MK Praktek 1 (PBA) Bimbingan praktek 30% Laporan Praktek (Pembimbingan mahasiswa) 70% Pemerolehan 5 SUKMA oleh WB Dari Pusat	S1 PGSD Semua Mahasiswa 3 MK Berpraktek 3 (PBA/TBM/Kepemudaan) Bimbingan praktek 50% Laporan Praktek (dilampiri 5 SUKMA dr 5 WB) 50% UAS Tidak ada bantuan dana

Mengingat bahwa program studi D2 PGSD telah ditutup tahun 2006, dan sudah tidak ada lagi mahasiswa D2 PGSD semester 5 yang dalam masa studi (bukan mahasiswa ALMS), seyogianya program PBA diimplementasikan melalui mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan.

Mencapai MDGs melalui program PBA?

Dari uraian terdahulu dikemukakan bahwa dari kedelapan sasaran dalam MDGs, sasaran ke-2 dan sasaran ke 7.1 merupakan sasaran yang agak ‘mudah’ untuk dicapai UT melalui implementasi program PBA. Mengapa demikian? Marilah kita telaah:

1. Sasaran ke-2: Tercapainya pendidikan dasar secara universal. Target sasaran ini adalah: Memastikan bahwa setiap anak laki-laki dan perempuan menyelesaikan pendidikan dasarnya.

Saat ini banyak Pemda yang sudah menggratiskan biaya pendidikan di SD. Walaupun gratisnya biaya pendidikan tersebut belum berlaku untuk semua SD di wilayah Pemda itu. Selain itu, adanya program Kejar Paket A memungkinkan anak-anak, yang karena kesibukannya membantu orang tua atau jauhnya jarak rumah/tempat tinggalnya ke SD terdekat, memperoleh dan

menyelesaikan pendidikan dasar. Sekarang tinggal kemauan anak dan keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya guna menuntut ilmu sehingga, paling tidak, menyelesaikan pendidikan dasar. Kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar inilah yang dititipkan ke program PBA untuk disampaikan ke WB yang kebanyakan adalah orang tua (yang mempunyai anak atau cucu).

2. Sasaran ke-7: Menjamin keberlanjutan lingkungan. Target sasaran ini antara lain adalah: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam program, serta memperbaiki sumber daya lingkungan yang rusak. Prinsip dalam Pendidikan Lingkungan adalah: *'Think globally, act locally'*. Bagaimana UT dapat mengedukasi masyarakat agar mereka ramah lingkungan sehingga mereka dapat menjadi pelindung atau penyelamat lingkungannya. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah orang-orang di sekitar kehidupan WB atau mahasiswa/alumni S1 PGSD. UT mempunyai PS Pengelolaan Lingkungan, PS-PS yang sangat berkaitan dengan lingkungan atau penyelamatan lingkungan (di FMIPA), ada juga mata kuliah PLH (Pendidikan Lingkungan Hidup) dan mata kuliah lain seperti Kimia Lingkungan dll (di FKIP), serta staf pengajar yang berlatar belakang pendidikan Biologi atau Lingkungan. Ini adalah aset UT untuk membantu Pemerintah dalam pencapaian sasaran 7.1 melalui program PBA. Karena mahasiswa dan WB yang sudah memahami tentang hakikat lingkungan hidup dan apa penyebab kerusakan lingkungan, diharapkan mempunyai sikap ramah lingkungan.
3. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar dan kesadaran untuk melindungi lingkungan melalui program PBA dilakukan dengan cara menyediakan bahan/materi untuk bahan bimbingan (digunakan mahasiswa untuk membimbing WB) dan referensi bagi mahasiswa. Bahan bimbingan perlu disediakan dari UT untuk menghindari miskonsepsi tentang konsep-konsep penyelamatan lingkungan. Demikian juga untuk menumbuhkan kesadaran untuk melepas anak guna bersekolah, kalau salah pendekatan yang

digunakan, bukannya motivasi atau kesadaran yang tumbuh tapi ketakutan.

Kesimpulan

Program PBA yang diimplementasikan melalui Program Studi PGSD dapat membantu Pemerintah untuk mencapai MDGs bila:

1. Program PBA dilaksanakan di UPBJJ-UPBJJ yang wilayah kerjanya merupakan kantong buta aksara. Maksudnya: Mahasiswa peserta mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan memilih Program PBA atau Praktek Pembelajaran Keaksaraan Fungsional sebagai tugas prakteknya.
2. Bahan bimbingan WB disediakan oleh UT sehingga diharapkan setelah lulus matakuliah ini mahasiswa dan WB mempunyai kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan dasar dan kesadaran untuk melindungi lingkungan.

Saran

Agar program PBA yang diimplementasikan melalui PS PGSD dapat membantu Pemerintah menekan angka buta aksara dan mencapai sasaran MDGs disarankan:

1. Mahasiswa PGSD (dari UPBJJ-UT yang mempunyai wilayah kerja sebagai kantong buta aksara) peserta mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasya-rakatan, diarahkan untuk melaksanakan Program PBA atau Praktek Pembelajaran Keaksaraan Fungsional sebagai pilihan prakteknya.
2. Kelulusan mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan 'dipermudah'. Misalnya dengan meniadakan persyaratan UAS, seperti halnya mata kuliah Pendidikan Masyarakat.
3. Bila memungkinkan, UT Pusat melanjutkan kerja sama dengan Ditjen PLS untuk membiayai program PBA.
4. Mendorong staf akademik untuk membuat bahan bimbingan yang dapat menumbuhkan kesadaran mahasiswa dan WB akan pentingnya

menyelesaikan pendidikan dasar dan melindungi lingkungan.

5. Meminta Ditjen PLS untuk meyakinkan Subdin/Kasi PLS tentang program BPA yang dilaksanakan UT.

Semoga tulisan yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi pelaksanaan program PBA di UT. Semoga UT dapat berpartisipasi aktif dalam membantu Pemerintah mencapai MDGs.

Daftar Bacaan

- Katalog Universitas Terbuka Tahun 2006 dan 2007
- Pedoman Penyelenggaraan Mata Kuliah Pendidikan Masyarakat/PGSD2407 Tahun 2006 dan 2007
- Buku Materi Pokok mata kuliah Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan/ PDGK4306 Tahun 2007
- Laporan Pelaksanaan Program Pemberantasan Buta Aksara di UPBJJ-UT Bogor Tahun 2006 dan 2007
- Petunjuk Teknis matakuliah PDGK4306 Tahun 2007